MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 401/DJMT.1/ST.KP7.1/III/2026

Menimbang : Bahwa Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI sedang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).

Dasar : Surat Kepala Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Nomor 371/BSDK/HM2.1.1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 perihal Rapat Penyusunan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Teguh Ahmadi, S.E., M.M./ 198406262009041007, Pembina (IV/a), Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat;
2. Victor Albadiu Ratib, S.H., M.H./ 199611022019031005, Penata (III/c), Kasubbag Akuntansi Sekretariat;
3. Sofiyatul Mu`Minah, S.Kom., M.Kom/ 19920401201903 2016, Penata Muda Tk. I (III/b), Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan;
4. Theo Afianto, S.T./ 199612112020121005, Penata Muda Tingkat I (III/b), Pranata Komputer Ahli Pertama.

Untuk : Melaksanakan Rapat Penyusunan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani pada Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang bertempat di HE 1O1 Bogor Suryakencana, Jl. Suryakencana No. 179 - 181, RT.01/RW.2, Babakan Ps., Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor. Jawa Barat pada tanggal 1 s.d. 3 April 2026;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

SODIKIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.